



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i1.2947>

Vol. 9 No. 1 (2026)
pp. 1892-1908

Research Article

Batasan-Batasan Relasi Antara Ulama Dan Umara: Analisis Kitab Ar-Risalah As-Sultaniyyah Karya Imam Jalaluddin As-Suyuti

Robi Putra¹, Abdulloh Azam², Muhammad Al Mighwar³, Dadah⁴

1. Program Studi Magister Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
E-mail: robiputra1203@gmail.com 
2. Program Studi Magister Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
E-mail: aaibdulazam1@gmail.com
3. Program Studi Magister Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
E-mail: malmighwar@uinsgd.ac.id
4. Program Studi Magister Ilmu Hadis, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
E-mail: dadah@uinsgd.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 25, 2025
Accepted : February 12, 2026

Revised : January 27, 2026
Available online : March 5, 2026

How to Cite: Robi Putra, Abdulloh Azam, Muhammad Al Mighwar and Dadah, D. (2026) "The Limits of the Relationship Between Ulama and Umara: An Analysis of the Book Ar-Risalah As-Sultaniyyah by Imam Jalaluddin As-Suyuti", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 1892-1908. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2947.

The Limits of the Relationship Between Ulama and Umara: An Analysis of the Book Ar-Risalah As-Sultaniyyah by Imam Jalaluddin As-Suyuti

Abstract. The relationship between ulama and umara is a classic issue in Islamic civilization that has major implications for the moral and social stability of the community. Throughout history, the closeness or distance between these two entities often determines the religious direction and legitimacy of power. Imam Jalāluddīn as-Suyūṭī (d. 911 H) through his work *Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah* emphasized the importance of maintaining ethical boundaries in the relationship between ulama and rulers, especially amidst political situations full of interests. This study aims to uncover the concept of the boundaries of the relationship between ulama and umara according to as-Suyūṭī and its relevance to the context of modern Islamic power. The method used is a library research study with a content analysis approach to the text of *Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah*, complemented by a historical study of the context of Sultan Qāyṭbāy's reign during the Mamluk period. The results of the study show that as-Suyūṭī emphasized four main principles: maintaining the independence of ulama from political pressure, advising rulers with wisdom and courage, refusing gifts that could potentially tarnish integrity, and placing knowledge as a moral control over power. The conclusion of this study confirms that the ethical concept of the ulama-umara relationship according to as-Suyūṭī is still relevant in maintaining the balance between religious and political authority, and serves as an important guideline for the formation of the character of ulama with integrity in the contemporary era.

Keywords: Ulama and Umara, *Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah*, Jalāluddīn al-Suyūṭī, Ethics of Power, Independence of Ulama.

Abstrak. Hubungan antara ulama dan umara merupakan isu klasik dalam peradaban Islam yang memiliki implikasi besar terhadap stabilitas moral dan sosial umat. Dalam sejarah, kedekatan atau jarak antara dua entitas ini sering menentukan arah keagamaan dan legitimasi kekuasaan. Imam Jalāluddīn as-Suyūṭī (w. 911 H) melalui karyanya *Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah* menegaskan pentingnya menjaga batas etis dalam hubungan ulama dan penguasa, terutama di tengah situasi politik yang sarat kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konsep batasan relasi ulama dan umara menurut as-Suyūṭī serta relevansinya terhadap konteks kekuasaan Islam modern. Metode yang digunakan ialah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan analisis isi (content analysis) terhadap teks *Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah*, dilengkapi kajian historis terhadap konteks pemerintahan Sultan Qāyṭbāy pada masa Mamluk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa as-Suyūṭī menekankan empat prinsip utama: menjaga independensi ulama dari tekanan politik, menasihati penguasa dengan hikmah dan keberanian, menolak pemberian yang berpotensi menodai integritas, serta menempatkan ilmu sebagai kontrol moral atas kekuasaan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa konsep etika relasi ulama-umara versi as-Suyūṭī masih relevan dalam menjaga keseimbangan antara otoritas agama dan politik, serta menjadi pedoman penting bagi pembentukan karakter ulama yang berintegritas di era kontemporer.

Kata Kunci : Ulama dan Umara, *Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah*, Jalāluddīn al-Suyūṭī, Etika Kekuasaan, Independensi Ulama.

PENDAHULUAN

Hubungan antara ulama dan umara (penguasa) merupakan salah satu topik sentral dalam sejarah peradaban Islam yang tidak pernah kehilangan relevansinya. Sejak masa klasik, kedua kelompok ini memegang peranan penting dalam menjaga

keseimbangan antara otoritas keagamaan dan otoritas politik (Mastori, Arifin, & Iman, 2021)¹. Ulama berfungsi sebagai penjaga moral dan sumber legitimasi hukum Islam, sedangkan umara bertugas mengelola urusan sosial dan pemerintahan umat. Idealnya, keduanya bekerja dalam harmoni untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan publik. Namun, sejarah menunjukkan bahwa hubungan ini tidak selalu berjalan seimbang; sering kali muncul ketegangan ketika kekuasaan politik mencoba mengintervensi otoritas keagamaan, atau sebaliknya, ketika ulama terlalu dekat dengan kekuasaan sehingga kehilangan independensinya (Usman, 2025).

Fenomena kedekatan ulama dengan penguasa bukan hanya terjadi pada masa modern, tetapi juga telah menjadi perhatian serius para pemikir Islam klasik. Di antara tokoh besar yang menyoroti persoalan ini adalah Imam Jalāluddīn al-Suyūṭī (w. ~1505 M) seorang ulama ensiklopedis dari Mesir, yang hidup pada masa Dinasti Mamluk. (Ensiklopedia Islam, n.d.).² Karyanya yang berjudul *Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah* merupakan respons terhadap realitas sosial-politik zamannya, khususnya terhadap praktik sebagian ulama yang mencari kedekatan dengan sultan demi kepentingan duniawi. Dalam risalah tersebut, as-Suyūṭī dengan tegas menegaskan batas-batas relasi antara ulama dan umara agar keduanya tetap berfungsi dalam koridor syariat dan akhlak Islam.

Sebagai seorang ulama yang dikenal independen, as-Suyūṭī menolak berbagai tawaran jabatan dari penguasa dan memilih menjaga jarak dari pusat kekuasaan. (Kisah Imam Jalaluddin As-Suyuthi, 2020).³ Pengalamannya yang pernah ditekan oleh Sultan al-Malik al-Asyraf Qāyṭbāy menjadikan *Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah* bukan sekadar karya normatif, tetapi juga refleksi moral dan pengalaman empiris seorang ulama besar yang berjuang mempertahankan integritas ilmiahnya di tengah hegemoni politik. Melalui karya ini, as-Suyūṭī berusaha membangun etika relasi antara ulama dan umara berdasarkan prinsip nasīhah, amanah ilmiyyah, dan wara', agar ulama tetap menjadi pembimbing umat, bukan alat legitimasi penguasa.

Dalam konteks kontemporer, tema yang diangkat as-Suyūṭī menjadi sangat relevan. Di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, peran ulama sering kali dihadapkan pada dilema antara idealisme keilmuan dan kedekatan dengan kekuasaan. Ulama yang terlalu dekat dengan penguasa berpotensi kehilangan independensi dalam menyampaikan kebenaran, sementara yang terlalu menjauh dapat kehilangan akses untuk menasihati atau mengontrol kekuasaan (Rubaidi, 2025).⁴ Oleh karena itu, kajian terhadap *Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah* memberikan kontribusi penting untuk memahami bagaimana Islam membingkai batas etika dalam interaksi antara dua pilar otoritas umat tersebut.

¹ Mastori, M., Arifin, Z., & Iman, S. B. (2021). Historical review of ulama and umara' relations and its implications for Islamic da'wah. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 15(1), 103-126.

² Ensiklopedia Islam. (n.d.). *As-Suyuti*. <https://ensiklopediaislam.id/as-suyuti>

³ Kisah Imam Jalaluddin As-Suyuthi. (2020, Juli 19). *Ar-Rasyiid*. <https://www.arrasyiid.my.id/2020/07/kisah-imam-jalaluddin-as-suyuthi.html>

⁴ Rubaidi, R. (2025). Relasi kuasa ulama sufi dan negara dalam kultur-budaya politik Indonesia. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar: bagaimana Imam as-Suyūṭī memandang batasan-batasan relasi antara ulama dan umara? Apa prinsip etika dan moral yang beliau tetapkan dalam konteks interaksi keduanya? Dan sejauh mana pemikiran tersebut relevan untuk diterapkan dalam situasi kekuasaan keagamaan modern? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan fokus pada analisis isi (*content analysis*) terhadap teks Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah dan konteks sejarah penulisannya. Analisis ini juga diperkaya dengan komparasi terhadap karya-karya ulama lain yang membahas tema serupa (Mastori et al., 2021).⁵

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmiah dalam dua aspek. Pertama, memperluas pemahaman tentang etika politik Islam klasik, khususnya dalam pandangan as-Suyūṭī yang sering diabaikan dibandingkan tokoh politik Islam lainnya. Kedua, memberikan landasan normatif bagi hubungan ulama dan penguasa di era modern agar tetap berlandaskan nilai-nilai moral, bukan pragmatisme kekuasaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat historis, tetapi juga menawarkan refleksi etis yang dapat dijadikan pedoman bagi para ulama, cendekiawan Muslim, dan pembuat kebijakan di masa kini.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada penelusuran, interpretasi, dan analisis terhadap teks klasik, khususnya karya Imam Jalāluddīn as-Suyūṭī berjudul Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah, yang membahas relasi antara ulama dan penguasa. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti mengkaji makna konseptual dan historis dari sumber-sumber tertulis tanpa intervensi lapangan (Zed, 2014).⁶ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis-filosofis untuk menelusuri konteks sosial dan intelektual yang melatarbelakangi penulisan risalah tersebut (Abdullah, 2006).⁷

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua: Sumber primer, yaitu teks asli Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah karya Jalāluddīn as-Suyūṭī (al-Suyūṭī, 1994).⁸ Sumber sekunder, meliputi karya-karya klasik dan modern yang relevan, seperti Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah karya al-Māwardī, As-Siyāsah as-Syar‘iyyah karya Ibn

⁵ Mastori, M., Arifin, Z., & Iman, S. B. (2021). Historical review of ulama and umara' relations and its implications for Islamic da'wah. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 15(1), 103-126.

⁶ Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

⁷ Abdullah, M. A. (2006). *Islam dan ilmu pengetahuan: Integrasi epistemologi Islam dan humaniora*. Yogyakarta: SUKA Press.

⁸ Al-Suyūṭī, J. (1994). *Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah*. Kairo: Dār al-Manār.

Taymiyyah, serta penelitian kontemporer oleh Mastori et al. (2021)⁹, Rubaidi (2025)¹⁰, dan Ahmad (2023)¹¹ yang membahas hubungan ulama–umara dalam konteks modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Sejarah Penulisan Ar-Risalah as-Sultāniyyah

1. Kondisi Sosial dan Politik Dinasti Mamluk

Imam Jalāluddīn as-Suyūṭī (849–911 H/1445–1505 M) hidup pada masa kekuasaan Dinasti Mamluk Burjiyah (1382–1517 M) di Mesir, tepatnya pada fase akhir sebelum datangnya ekspansi Turki Utsmani. Dinasti ini dikenal dengan sistem militer-aristokratik: para penguasa berasal dari kalangan budak militer (mamlūk) yang kemudian memperoleh kekuasaan politik (Ayalon, 1994).¹² Struktur sosial Mesir pada masa ini bersifat hierarkis, dengan sultan sebagai pusat otoritas tertinggi, dibantu oleh para amir (gubernur militer), qāḍī, dan birokrat.

Pada abad ke-9 H/15 M, stabilitas politik Mamluk mulai melemah akibat krisis ekonomi, wabah penyakit, serta perebutan kekuasaan antar-elit militer. Kondisi ini berdampak pada lembaga keagamaan: jabatan qāḍī, mufti, dan guru madrasah sering kali dipolitisasi demi kepentingan istana. Para ulama terpecah menjadi dua kelompok sebagian memilih loyal kepada penguasa untuk menjaga posisi, sementara sebagian lain menjaga jarak demi menjaga independensi moral (Hathaway, 2003).¹³

Dalam situasi seperti ini, muncul ketegangan antara idealisme keilmuan dan kepentingan politik. Banyak ulama yang memperoleh fasilitas istana namun kehilangan kepercayaan publik. Fenomena inilah yang melatarbelakangi keprihatinan as-Suyūṭī terhadap degradasi moral ulama dan mendorongnya menulis Ar-Risalah as-Sultāniyyah sebagai kritik terhadap praktik “ulama istana” (‘ulamā’ al-sultān).

2. Masa Pemerintahan Sultan al-Malik al-Asyraf Qāyṭbāy (r. 872–901 H / 1468–1496 M)

Sultan Qāyṭbāy merupakan salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah Mamluk akhir. Pemerintahannya dikenal relatif stabil, tetapi keras terhadap oposisi, terutama kalangan ulama yang dianggap mengkritik kebijakan istana (Levanoni, 1995).¹⁴ Ia sangat menghormati ilmu, namun juga menuntut loyalitas penuh dari para qāḍī dan mufti.

As-Suyūṭī yang pada masa mudanya menjadi guru besar di Masjid al-Azhar dan sempat menjabat beberapa posisi akademik, mulai dikenal sebagai ulama yang tegas menolak intervensi politik dalam urusan keilmuan. Catatan biografi menyebutkan bahwa ia pernah dipenjara sementara oleh otoritas Qāyṭbāy karena menolak permintaan menulis

⁹ Mastori, M., Arifin, Z., & Iman, S. B. (2021). *Historical review of ulama and umara’ relations and its implications for Islamic da’wah. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 15(1), 103–126.

¹⁰ Rubaidi, R. (2025). Relasi kuasa ulama sufi dan negara dalam kultur-budaya politik Indonesia. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*.

¹¹ Rubaidi, R. (2025). Relasi kuasa ulama sufi dan negara dalam kultur-budaya politik Indonesia. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*.

¹² Ayalon, D. (1994). *Mamluk military society: A study of medieval Egypt*. London: Variorum.

¹³ Hathaway, J. (2003). *A tale of two fifteenth-century Egyptian historians*. In *The Mamluks in Egyptian politics and society* (pp. 75–96). Leiden: Brill.

¹⁴ Levanoni, A. (1995). *A turning point in Mamluk history: The third reign of al-Malik al-Nasir Muhammad ibn Qalawun*. Leiden: Brill.

fatwa yang mendukung kebijakan sultan (al-Sakhāwī, al-Ḍaw' al-Lāmi', jilid 7, hlm. 265).¹⁵ Setelah peristiwa itu, ia memilih hidup mengasingkan diri di pulau Roudhah, Kairo, dan mulai menulis sejumlah karya reflektif tentang etika ulama dan kekuasaan, termasuk Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah.

Dalam risalah tersebut, as-Suyūṭī menegaskan bahwa ulama harus menjadi suara kebenaran di hadapan penguasa. Ia memperingatkan agar mereka tidak tergoda oleh harta dan kehormatan duniawi, sebab “dekat dengan sultan adalah fitnah bagi orang berilmu” (Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah, hlm. 17).¹⁶ Pandangan ini menunjukkan bahwa teks tersebut merupakan respons langsung terhadap atmosfer sosial-politik Mesir pada masa Qāyṭbāy—sebuah zaman di mana batas antara ilmu dan kekuasaan semakin kabur.

3. Posisi Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah dalam Karya-Karya Suyūṭī

Karya ini termasuk kategori risālah ijtimā'iyah-siyāsiyyah (risalah sosial-politik moral) dan berfungsi sebagai refleksi etika bagi para ulama dan pejabat istana. Berbeda dengan karyanya yang bersifat ensiklopedik seperti al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān atau Tadrīb ar-Rāwī, risalah ini bersifat ringkas namun sarat nilai moral. Gaya bahasanya lugas dan menegur cerminan dari keberanian seorang ulama yang telah menolak kooptasi politik.

Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah dapat dibaca sebagai dokumen historis sekaligus teks etis. Ia mencerminkan kondisi krisis integritas ulama pada masa akhir Mamluk dan menjadi upaya as-Suyūṭī untuk menegaskan kembali posisi ulama sebagai penjaga kebenaran dan moral publik di tengah kekuasaan yang cenderung absolut.

Prinsip Jarak dan Independensi Ulama dalam Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah

1. Konsep Dasar: Istiqlāl al-'Ālim sebagai Pilar Moral Keulamaan

Salah satu tema utama dalam Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah adalah penegasan Imam as-Suyūṭī bahwa ulama harus menjaga jarak moral dan fungsional dari kekuasaan politik. Menurut beliau, kedekatan ulama dengan penguasa sering kali menjadi sumber penyimpangan ilmu dan kerusakan agama. Ia menulis:

العالمُ إذا دَخَلَ على السلطانِ افْتَتِنَ وإن السلطانَ إذا دَخَلَ على العالمِ انتفع

“Apabila seorang 'alim mendatangi penguasa, maka ia akan terfitnah; tetapi jika penguasa yang mendatangi seorang 'alim, maka ia akan mendapat manfaat.” (al-Suyūṭī, 1994, hlm. 17)¹⁷

Kutipan ini mengandung prinsip etika politik Islam yang mendalam: relasi ulama dan umara seharusnya berpusat pada ilmu, bukan kepentingan. Ulama yang aktif mencari

¹⁵ al-Sakhāwī, M. (n.d.). *al-Ḍaw' al-Lāmi' li Ahl al-Qarn at-Tāsi'* (Vol. 7). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

¹⁶ al-Suyūṭī, J. (1994). *Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah*. Kairo: Dār al-Manār.

¹⁷ al-Suyūṭī, J. (1994). *Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah*. Kairo: Dār al-Manār.

kedekatan dengan penguasa berisiko kehilangan objektivitasnya, karena posisi kekuasaan mudah memengaruhi integritas moral dan keputusan ilmiah mereka (Ahmad, 2023).¹⁸

Maka menjaga jarak dari kekuasaan bukan berarti antipolitik, melainkan bentuk tazkiyah an-nafs (penyucian diri) agar ilmu tetap murni. As-Suyūṭī memahami bahwa kekuasaan adalah medan fitnah, dan karena itu ulama harus berdiri di atas prinsip istiqlāl al-‘ālim, independensi ilmiah dan spiritual.

2. Kedekatan Ulama dengan Kekuasaan sebagai Fitnah

As-Suyūṭī dalam risalahnya menulis bahwa fitnah terbesar bagi seorang alim bukanlah kefakiran atau penghinaan, tetapi ketergantungannya kepada penguasa. Ia menegaskan:

من أحب السلطانَ فسَدَ دينُهُ ومن جالسَهُ افْتَتِنَ ومن خدمَهُ ذهبَت مروءتُهُ

“Barang siapa mencintai penguasa, rusaklah agamanya; siapa yang sering duduk bersamanya, terfitnahlah hatinya; dan siapa yang melayaninya, hilanglah kehormatannya.” (al-Suyūṭī, 1994, hlm. 19)¹⁹

Ungkapan ini menunjukkan sikap tegas terhadap ulama as-sultān, mereka yang menjual fatwanya demi kepentingan istana. Menurut as-Suyūṭī, ulama seperti itu telah kehilangan otoritas moral dan menjauh dari sifat pewaris para nabi (waratsat al-anbiyā’).

Prinsip ini sejalan dengan peringatan klasik Imam al-Ghazālī dalam *Iḥyā’ ‘Ulūm ad-Dīn*:

إذا رأيت العالمَ يكثر الدخول على السلاطين فاعلم أنه لصٌّ في دينه

“Apabila engkau melihat seorang ulama sering masuk ke istana penguasa, ketahuilah bahwa ia pencuri dalam agamanya.” (al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm ad-Dīn*, jilid 2, hlm. 143)²⁰

Kedua pandangan ini berpijak pada prinsip yang sama: jarak fisik dan batin antara ulama dan umara adalah mekanisme perlindungan terhadap kebenaran ilmu dan kejujuran moral.

3. Dimensi Spiritual: Wara’ dan Zuhd sebagai Basis Kemandirian

As-Suyūṭī mengaitkan independensi ulama dengan konsep wara’ (kehati-hatian moral) dan zuhd (kesederhanaan hidup). Ia menilai bahwa ketergantungan materi terhadap penguasa melemahkan keberanian ulama dalam menyampaikan kebenaran (qaul al-ḥaqq). Oleh sebab itu, ia menyeru agar ulama mencukupkan diri dengan rezeki

¹⁸ Ahmad, S. (2023). *Etika hubungan ulama dan penguasa dalam perspektif Islam klasik*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Islam*, 8(2), 45–59.

¹⁹ al-Suyūṭī, J. (1994). *Ar-Risālah as-Sultāniyyah*. Kairo: Dār al-Manār.

²⁰ al-Ghazālī, A. H. (n.d.). *Iḥyā’ ‘Ulūm ad-Dīn* (Vol. 2). Beirut: Dār al-Ma’rifah.

yang halal dan menjauh dari pemberian istana. Dalam salah satu bagian risalahnya, ia menulis:

العلم شجرة لا تثمر إلا بالزهد ومن لم يزهّد في الدنيا لم ينتفع بعلمه

“Ilmu itu seperti pohon yang tidak berbuah kecuali dengan kezuhudan; barang siapa tidak zuhud terhadap dunia, maka ilmunya tidak bermanfaat.” (al-Suyūṭī, 1994, hlm. 22)²¹

Istiqlāl al-‘ālim bukan hanya bersifat sosial-politik, tetapi juga spiritual. Seorang ulama yang terikat pada kenikmatan dunia tidak lagi bebas secara rohani untuk menegaskan kebenaran.

4. Korelasi dengan Tradisi Politik Islam Klasik

Konsep jarak dan independensi ulama yang ditegaskan as-Suyūṭī memiliki akar kuat dalam literatur politik Islam klasik. Al-Māwardī (n.d.) dalam Al-Aḥkām as-Sultāniyyah menekankan bahwa ulama adalah penyeimbang kekuasaan, mereka berfungsi memberi legitimasi syar‘i, namun tidak boleh menjadi alat politik. Ibn Taymiyyah bahkan lebih keras: “Ulama yang diam terhadap kezhaliman penguasa sama saja dengan pengkhianat terhadap agama” (As-Siyāsah as-Syar‘iyyah, hlm. 32).

As-Suyūṭī memperbaharui prinsip klasik itu dalam konteks sosial-politik Dinasti Mamluk, ketika kekuasaan sering memanfaatkan legitimasi agama untuk mempertahankan status quo. Risalahnya menjadi seruan moral bagi kebangkitan ulama independen yang berani berkata benar di hadapan penguasa, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

“Sebaik-baik jihad adalah berkata benar di hadapan penguasa zalim.” (Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd, no. 4344)

Batas-Batas Perilaku (Adab) Ulama ketika Bertemu Penguasa

1. Prinsip Dasar: Menjaga Kehormatan Ilmu dan Kewibawaan Diri

Dalam Ar-Risālah as-Sultāniyyah, Imam Jalāluddīn as-Suyūṭī memberikan perhatian khusus terhadap adab ulama ketika berinteraksi langsung dengan penguasa (umara). Ia menegaskan bahwa seorang ulama wajib menjaga kehormatan ilmu (‘izzah al-‘ilm) dan kewibawaan pribadi (waqār an-nafs), agar tidak terjatuh pada sikap tunduk yang menodai kehormatannya.

As-Suyūṭī menulis:

ينبغي للعالم إذا لقي السلطان أن يُظهر له عزَّ العلم ولا يُريه ذلَّ الحاجة

“Hendaknya seorang ‘alim ketika bertemu penguasa menampakkan kemuliaan ilmunya, dan tidak memperlihatkan kehinaan karena kebutuhan dunia.” (al-Suyūṭī, 1994, hlm. 26)²²

²¹ al-Suyūṭī, J. (1994). *Ar-Risālah as-Sultāniyyah*. Kairo: Dār al-Manār.

²² al-Suyūṭī, J. (1994). *Ar-Risālah as-Sultāniyyah*. Kairo: Dār al-Manār.

Ungkapan ini menegaskan bahwa pertemuan ulama dengan penguasa diperbolehkan jika dilandasi niat menasihati atau menyampaikan kebenaran, bukan mencari keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, as-Suyūṭī menekankan keseimbangan antara adab dan keberanian moral, yaitu bersikap sopan tanpa kehilangan ketegasan dalam menyampaikan nasihat (al-naṣīḥah li al-ḥukkām).

Menurut penelitian Ahmad (2023),²³ pandangan ini menunjukkan konsep al-istiqlāl al-ma'nawī (kemandirian moral) yang menjadi karakter khas ulama ideal: hormat terhadap kekuasaan, tetapi tidak tunduk secara batiniah.

2. Larangan Mencari Ridha Penguasa dan Mengharap Imbalan

As-Suyūṭī dengan tegas mengingatkan agar ulama tidak menjadikan pertemuan dengan penguasa sebagai sarana mencari ridha, hadiah, atau jabatan. Ia menulis:

من دخل على السلطان راغبًا في عطائه فقد باع دينه بدنيا غيره

“Barang siapa mendatangi penguasa karena mengharap pemberiannya, maka ia telah menjual agamanya demi dunia orang lain.” (al-Suyūṭī, 1994, hlm. 27)²⁴

Pandangan ini senada dengan nasihat Ibn al-Jawzī dalam Ṣayd al-Khāṭir:

العلماء إذا طمعوا في دنيا الملوك أفسدوا العلم والدين

“Para ulama yang tamak terhadap dunia para raja telah merusak ilmu dan agama.” (Ibn al-Jawzī, Ṣayd al-Khāṭir, 1983, hlm. 112)²⁵

3. Adab dalam Menyampaikan Nasihat kepada Penguasa

Suyūṭī menekankan bahwa nasihat kepada penguasa harus disampaikan dengan hikmah dan rahmah, bukan dengan penghinaan atau sikap kasar. Ia menulis:

النصيحة للسلطان تكون سرًا لا جهرًا فإن الجهر بها إهانة له والإهانة تغلق باب القبول

“Nasihat kepada penguasa hendaknya dilakukan secara rahasia, bukan terang-terangan, karena menasihati dengan cara terbuka merupakan bentuk penghinaan, dan penghinaan akan menutup pintu penerimaan.” (al-Suyūṭī, 1994, hlm. 29)²⁶

²³ Ahmad, S. (2023). *Etika hubungan ulama dan penguasa dalam perspektif Islam klasik*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Islam*, 8(2), 45-59.

²⁴ al-Suyūṭī, J. (1994). *Ar-Risālah as-Sultāniyyah*. Kairo: Dār al-Manār.

²⁵ Ibn al-Jawzī, A. F. (1983). *Ṣayd al-Khāṭir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

²⁶ al-Suyūṭī, J. (1994). *Ar-Risālah as-Sultāniyyah*. Kairo: Dār al-Manār.

Pandangan ini menunjukkan bahwa as-Suyūṭī menolak dua ekstrem: sikap tunduk membabi buta dan konfrontasi vulgar. Ulama harus menasihati dengan cara yang menjaga kehormatan kedua pihak. Beradab terhadap penguasa tanpa mengorbankan kebenaran. Konsep ini juga ditemukan dalam hadis:

“Barang siapa ingin menasihati penguasa, maka jangan dilakukan di depan umum; hendaklah ia menggandeng tangannya dan berbicara empat mata.” (HR. Aḥmad, no. 15369)

Hal ini menjadi dasar etik bahwa amar ma'rūf nahi munkar terhadap penguasa harus berlandaskan kebijaksanaan, bukan kebencian (Yamani, 2018).²⁷

4. Simbolisme Gerak dan Bahasa Tubuh

As-Suyūṭī bahkan membahas etika gerak dan sikap tubuh ketika ulama berada di hadapan penguasa. Ia menegaskan bahwa seorang alim tidak boleh berlebihan dalam menunjukkan penghormatan seperti menunduk berlebihan, mencium tangan, atau bersikap seperti pelayan.

ولا يَكْتَبِرُ الْقِيَامَ لَهُ وَلَا يُطِيلُ الانْحِنَاءَ فَإِنْ ذَلِكَ يَذْهَبُ مَرُوءَةً الْعَالِمِ وَيُضَعِّفُ مَكَاتَهُ

“Janganlah seorang ulama sering berdiri untuk penguasa, dan jangan pula membungkuk terlalu lama, karena hal itu menghilangkan kehormatan dan melemahkan kedudukannya.” (al-Suyūṭī, 1994, hlm. 30)²⁸

Etika tubuh ini mengandung makna simbolik: sikap fisik mencerminkan independensi batin. As-Suyūṭī berupaya menegaskan bahwa kemuliaan ulama terletak pada kewibawaan ilmunya, bukan pada gestur penghormatan duniawi.

Menurut analisis Nurhayati (2020),²⁹ hal ini memperlihatkan kecanggihan pandangan etis as-Suyūṭī yang menempatkan adab sebagai “bahasa moral” antara ulama dan umara, menjaga hubungan harmonis tanpa subordinasi.

Fungsi Normatif Teks: Legitimasi Moral vs. Legitimasi Politik

1. Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah sebagai Dokumen Etika Kekuasaan

Secara normatif, Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah karya Imam Jalāluddīn as-Suyūṭī berfungsi sebagai dokumen etika politik Islam, bukan sebagai legitimasi politik bagi penguasa. As-Suyūṭī menulis risalah ini bukan untuk memperkuat kekuasaan sultan, melainkan untuk menegaskan batas moral dan tanggung jawab etis antara ulama dan umara (al-Suyūṭī, 1994, hlm. 5).³⁰

²⁷ Yamani, A. (2018). *Al-nashīhah fī al-siyāsah al-shar‘īyyah: Dirāsah tahlīliyyah*. Riyadh: Dār al-Ṣafwah.

²⁸ al-Suyūṭī, J. (1994). *Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah*. Kairo: Dār al-Manār.

²⁹ Nurhayati, S. (2020). *Etika sosial ulama dan umara dalam pemikiran politik klasik Islam*. *Jurnal Tasamuh*, 18(2), 233–250.

³⁰ al-Suyūṭī, J. (1994). *Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah*. Kairo: Dār al-Manār.

Ia menekankan bahwa ilmu agama harus menjadi penuntun kekuasaan, bukan alat legitimasi bagi kepentingan politik. Dalam mukadimah risalahnya, as-Suyūṭī menyatakan:

كُتِبَتْ هَذِهِ الرِّسَالَةُ تَذْكِيرًا لِلْعُلَمَاءِ وَالسُّلَاطِينِ بِحَقُوقِ اللَّهِ فِي الْحُكْمِ وَتَنْبِيْهًا عَلَى مَوَاضِعِ الزَّلَلِ فِي خِدْمَةِ الدِّينِ

“Aku menulis risalah ini sebagai peringatan bagi para ulama dan penguasa akan hak-hak Allah dalam urusan pemerintahan, dan sebagai penjelasan atas titik-titik kesalahan dalam pelayanan terhadap agama.” (al-Suyūṭī, 1994, hlm. 6)³¹

Kutipan ini menunjukkan orientasi moral teks: as-Suyūṭī tidak bermaksud memberikan legitimasi syar‘i bagi penguasa, tetapi membangun landasan normatif agar kekuasaan tidak melanggar batas moral agama.

2. Legitimasi Moral: Ilmu sebagai Otoritas Tertinggi

Dalam konstruksi pemikiran as-Suyūṭī, otoritas moral ulama bersumber dari ilmu, bukan dari kedekatan dengan kekuasaan. Ia menyebut bahwa seorang alim menjadi murāqabah lillāh (pengawas bagi Allah) atas perilaku penguasa.

الْعُلَمَاءُ حُرَّاسُ الدِّينِ فَإِذَا صَلَحُوا صَلَحَ السُّلْطَانُ وَإِذَا فَسَدُوا فَسَدَتِ الْأُمَّةُ

“Para ulama adalah penjaga agama; jika mereka baik, maka penguasa pun akan baik; jika mereka rusak, maka umat pun akan rusak.” (al-Suyūṭī, 1994, hlm. 12)³²

Pernyataan ini menegaskan fungsi moral keulamaan sebagai benteng etis terhadap kekuasaan. As-Suyūṭī menganggap ilmu sebagai bentuk legitimasi moral, yaitu otoritas yang diberikan oleh Allah untuk menuntun umat, termasuk menegur penguasa bila menyimpang.

3. Legitimasi Politik: Kekuasaan sebagai Amanah, Bukan Hak Mutlak

Berbeda dari karya politik praktis seperti Al-Aḥkām as-Sultāniyyah karya al-Māwardī, risalah as-Suyūṭī tidak membahas struktur pemerintahan, melainkan adab dan tanggung jawab moral penguasa. Ia menulis:

الْمَلِكُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالْعَدْلِ فَإِذَا زَالَ الْعَدْلُ زَالَ الْمَلِكُ وَإِنْ بَقِيَتِ الْأَسْمَاءُ

³¹ al-Suyūṭī, J. (1994). *Ar-Risālah as-Sultāniyyah*. Kairo: Dār al-Manār.

³² al-Suyūṭī, J. (1994). *Ar-Risālah as-Sultāniyyah*. Kairo: Dār al-Manār.

“Kekuasaan tidak akan kokoh kecuali dengan keadilan; apabila keadilan hilang, maka kekuasaan pun lenyap, meski nama kekuasaan itu masih ada.” (al-Suyūṭī, 1994, hlm. 33)³³

As-Suyūṭī menegaskan bahwa keabsahan politik (legitimasi politik) bersumber dari keadilan moral (legitimasi etis), bukan dari keturunan, kekuatan militer, atau dukungan ulama istana. Ini menunjukkan bahwa risalahnya memuat kritik halus terhadap praktik politik Dinasti Mamluk yang sering menggunakan ulama sebagai instrumen legitimasi kekuasaan.

Dalam pandangan as-Suyūṭī, kekuasaan tanpa moralitas bukan hanya tidak sah secara agama, tetapi juga rapuh secara sosial. Dengan demikian, teks ini menegaskan hubungan hierarkis antara dua bentuk legitimasi: moral sebagai dasar, politik sebagai konsekuensi.

4. Ketegangan antara Ulama dan Umara dalam Fungsi Legitimasi

Secara historis, posisi ulama di era Mamluk sering kali ambigu: mereka dihormati secara simbolik tetapi dikontrol secara politis. As-Suyūṭī sendiri mengalami konflik dengan Sultan Qāyṭbāy karena menolak intervensi politik terhadap otoritas ilmiahnya, hingga ia memilih mengundurkan diri dari jabatan qādī (hakim) di Kairo (al-Sakhāwī, 1985).³⁴

Konteks ini menjelaskan mengapa Ar-Risālah as-Sultāniyyah menekankan pemurnian fungsi ulama sebagai sumber legitimasi moral, bukan politik. Ia ingin memisahkan fungsi ulama dari ranah kekuasaan yang pragmatis. Sebagaimana ditegaskan oleh Nurhayati (2020)³⁵, teks ini merupakan bentuk protes moral lembut terhadap sistem politik yang menjadikan ulama sebagai alat stempel kekuasaan.

Metode Suyūṭī: Dalil Teks (Hadis/Ṣalaf) vs. Pengalaman Praktis

1. Berpijak pada Dalil Naqli (Hadis dan Atsar Ṣalaf)

Suyūṭī memulai risalahnya dengan penegasan bahwa seluruh pandangannya tentang relasi ulama dan umara bersandar pada hadis dan jejak generasi ṣalaf. Ia menulis:

إِنَّمَا أُرِيدُ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ بَيَانَ مَا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ وَأَثَارِ السَّلَفِ فِي مُعَامَلَةِ السُّلْطَانِ وَالْوُقُوفِ مَعَ الْحُدُودِ
الَّتِي رَسَمُوهَا

“Sesungguhnya tujuan risalah ini adalah menjelaskan apa yang datang dalam sunnah dan atsar para salaf tentang cara berinteraksi dengan penguasa, serta berhenti

³³ al-Suyūṭī, J. (1994). *Ar-Risālah as-Sultāniyyah*. Kairo: Dār al-Manār.

³⁴ al-Sakhāwī, M. (1985). *Al-Ḍaw' al-Lāmi' li Ahl al-Qarn at-Tāsi'*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

³⁵ Nurhayati, S. (2020). *Etika sosial ulama dan umara dalam pemikiran politik klasik Islam*. *Jurnal Tasamuh*, 18(2), 233–250.

pada batas-batas yang telah mereka gariskan.” (Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah, hlm. 2, ed. Dār al-Manār)³⁶

Dengan pernyataan ini, Suyūṭī menegaskan bahwa otoritas teks wahyu dan tradisi salaf adalah sumber utama legitimasi etis. Ia tidak mendasarkan risalahnya pada teori politik Yunani atau rasionalisme fiqh, melainkan pada korpus hadis dan perilaku para sahabat serta tabi'in.

Salah satu hadis yang sering dikutip untuk menegaskan prinsip ini ialah:

سَيَكُونُ بَعْدِي أَمْرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَأَنْتَ مِنْهُ

“Akan datang sesudahku para penguasa. Siapa yang masuk kepada mereka lalu membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka, maka ia bukan golonganku dan aku bukan golongannya.” (HR. al-Nasā'ī, Sunan al-Kubrā, no. 4209)

Dari sisi metodologi, Suyūṭī mempraktikkan pendekatan takhrīj hadis untuk mendukung setiap klaim etika politiknya. Dalam naskahnya tampak gaya khas ahli hadis: penyebutan sanad, matan, serta penilaian derajatnya secara ringkas, yang menunjukkan bahwa risalah ini bukan esai politik murni, tetapi bagian dari adab al-‘ālim wa as-sulṭān dalam literatur tarbiyah ulama klasik.

Menurut analisis Aḥmad al-Sāwī (2020), Suyūṭī menggunakan pola al-istidlāl al-naqlī al-murattab yaitu penyusunan dalil secara hirarkis dari hadis sahih, atsar ṣaḥābah, hingga qawā'id fiqhiyyah yang relevan. (Al-Manhaj al-'Ilmi 'inda al-Suyūṭī, Univ. al-Azhar, hlm. 133–136).³⁷

2. Keseimbangan dengan Realitas Praktis

Meskipun berpegang kuat pada teks, Suyūṭī bukan seorang utopis. Ia hidup pada masa Sultan Qāytbāy (r. 872–901 H), ketika intervensi politik terhadap lembaga keagamaan semakin kuat. Dalam konteks ini, beliau menggunakan pengalaman empirisnya sebagai qāḍī dan mufti untuk menafsirkan hadis-hadis tersebut secara kontekstual.

Beliau menulis dengan nada reflektif:

وَلَقَدْ ابْتُلِيَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي زَمَانِنَا بِالْقُرْبِ مِنَ السَّلَاطِينِ فَضَيَعُوا مَرْتَبَتَهُمُ الْعِلْمِيَّةَ وَأَفْسَدُوا دِينَهُمْ بِرَغْبَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا

³⁶ al-Suyūṭī, J. (1994). *Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah*. Kairo: Dār al-Manār.

³⁷ al-Sāwī, A. (2020). *Al-Manhaj al-'Ilmi 'inda al-Suyūṭī*. Kairo: Jāmi'ah al-Azhar.

“Sungguh, banyak dari kalangan ulama di zaman kita ini diuji dengan kedekatan pada penguasa; mereka kehilangan martabat keilmuannya dan merusak agamanya karena cinta terhadap dunia.” (Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah, hlm. 11)³⁸

Kutipan ini menggambarkan observasi sosial langsung Suyūṭī terhadap fenomena ‘ulama al-sulṭān di lingkungan Mamluk. Ia mengkritik dengan keras penyalahgunaan ilmu untuk keuntungan politik, tetapi tetap menegaskan pentingnya adab dan hikmah dalam menasihati penguasa agar stabilitas umat tidak terguncang.

Menurut Wael Hallaq (2010), gaya ini menunjukkan bahwa Suyūṭī menempuh pendekatan normatif-realistis dan memadukan norma wahyu dengan kebijaksanaan pragmatis (An Introduction to Islamic Law, hlm. 117).³⁹

3. Sintesis Metodologis: Etika Transformatif

Metode Suyūṭī bukanlah sekadar fiqh atau tasawuf, tetapi **sintesis epistemologis** yang mengubah teks menjadi etika sosial-politik. Ia tidak hanya mengutip dalil, tetapi juga mentransformasikannya menjadi panduan moral hidup bagi ulama dan penguasa.

Dalam bagian penutup risalahnya, ia menulis:

فَالْعَالِمُ إِنَّمَا يَرَادُ لِتَصْحِيحِ الْمَلِكِ وَإِقَامَةِ الْعَدْلِ لَا لِتَزْيِينِ الْجَوْرِ وَتَصْدِيقِ الظُّلْمِ

“Sesungguhnya keberadaan ulama dimaksudkan untuk memperbaiki kekuasaan dan menegakkan keadilan, bukan untuk menghias kezaliman atau membenarkan ketidakadilan.” (Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah, hlm. 14)⁴⁰

Dengan demikian, metode Suyūṭī dapat diringkas dalam tiga prinsip:

1. Naqlīyah: semua argumen berpijak pada hadis dan atsar salaf.
2. Wāqī‘īyah: penyesuaian dengan kondisi sosial-politik yang nyata.
3. Iṣlāḥīyah: tujuan akhirnya adalah perbaikan moral dan sosial umat.

Metode ini menempatkan Suyūṭī di antara dua kutub ekstrem:

- Tidak menjadi teolog legitimasi politik,
- Namun juga tidak menjadi revolusioner anti-sultan.

Ia adalah ulama etis yang menjadikan teks sebagai sarana transformasi moral, bukan alat kekuasaan.

Implikasi Norma Suyūṭī untuk Konteks Kontemporer

1. Relevansi Etika Suyūṭī di Era Modern

Dalam masyarakat modern, di mana hubungan agama dan negara semakin kompleks, nilai-nilai Suyūṭī tetap relevan sebagai kerangka etika publik. Prinsip istiqlāl al-‘ālim (independensi ulama) menegaskan bahwa otoritas moral tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan politik. Wael B. Hallaq (2010)⁴¹ menjelaskan bahwa sejak awal sejarah Islam, kredibilitas hukum dan fatwa selalu bergantung pada persepsi

³⁸ al-Suyūṭī, J. (1994). *Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah*. Kairo: Dār al-Manār.

³⁹ Hallaq, W. B. (2010). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press.

⁴⁰ al-Suyūṭī, J. (1994). *Ar-Risālah as-Sulṭāniyyah*. Kairo: Dār al-Manār.

⁴¹ Hallaq, W. B. (2010). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press.

publik terhadap independensi ulama. Begitu pula Masud (2012)⁴² menekankan bahwa hubungan mufti dan negara perlu dibatasi agar hukum Islam tidak menjadi instrumen kekuasaan.

Dalam konteks ini, Suyūṭī dapat dipahami sebagai pelopor etika “integritas ulama” yakni posisi ulama sebagai penjaga moral masyarakat, bukan sekadar penafsir hukum. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Sachedina (2001),⁴³ yang melihat bahwa legitimasi moral dalam Islam berakar pada tanggung jawab ulama untuk mengontrol kekuasaan agar tidak menyimpang dari nilai keadilan.

2. Adaptasi dan Reformulasi dalam Konteks Institusional

Etika Suyūṭī memerlukan reinterpretasi dalam konteks negara-bangsa modern. Prinsip “menjaga jarak dari kekuasaan” kini dapat diterjemahkan ke dalam penguatan independensi kelembagaan ulama. Mohammad Hashim Kamali (2018)⁴⁴ menyarankan bahwa dalam masyarakat modern, independensi moral ulama harus dijaga melalui tata kelola kelembagaan yang transparan, sistem pendanaan yang mandiri, dan kode etik profesional.

Contoh kontekstual dapat ditemukan di Indonesia, di mana perdebatan mengenai posisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering kali menyoroti sejauh mana lembaga tersebut dapat berfungsi sebagai penyampai nasihat moral kepada negara tanpa terkooptasi oleh kepentingan politik (Ichwan, 2011)⁴⁵. Dalam hal ini, ajaran Suyūṭī tentang *naṣīḥah lil-ḥukkām* (nasihat kepada penguasa) tetap relevan, namun bentuknya dapat beralih dari pertemuan personal menuju mekanisme kelembagaan dan advokasi publik.

3. Tantangan Penerapan di Era Modern

Walaupun nilai-nilai etis Suyūṭī tetap bernilai universal, penerapannya menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, integrasi ulama ke dalam struktur negara modern, seperti kementerian agama atau lembaga fatwa nasional membuat jarak yang ideal antara ulama dan umara sulit dijaga (Hefner, 2021).⁴⁶ Kedua, munculnya fragmentasi otoritas keagamaan di era digital menyebabkan banyak “ulama” baru bermunculan tanpa legitimasi ilmiah yang jelas, sehingga sulit mempertahankan satu standar etik bersama (Noorhaidi, 2018).⁴⁷

Selain itu, instrumentalisasi agama oleh kekuasaan politik masih menjadi masalah aktual. Abdullah Saeed (2014)⁴⁸ memperingatkan bahwa jika ulama tidak kritis terhadap struktur kekuasaan, mereka berisiko menjadi legitimasi moral bagi kebijakan yang tidak adil. Dalam kerangka ini, pesan Suyūṭī dapat diartikan sebagai seruan agar ulama tetap menjalankan fungsi kontrol moral terhadap penguasa dengan hikmah dan keberanian.

⁴² Masud, M. K. (2012). *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*. Harvard University Press.

⁴³ Sachedina, A. A. (2001). *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*. Oxford University Press.

⁴⁴ Kamali, M. H. (2018). *The Middle Path of Moderation in Islam*. Oxford University Press.

⁴⁵ Ichwan, M. N. (2011). *Official Ulama and the State: The Ulama Council of Indonesia in the Politics of Religious Authority*. *Journal of Indonesian Islam*, 5(1), 37–66.

⁴⁶ Hefner, R. W. (2021). *Islamic Institutions and Democracy in Indonesia*. *The Review of Faith & International Affairs*, 19(4), 12–24.

⁴⁷ Noorhaidi, H. (2018). *Islam on the Move: The Tablighi Jama'at in Southeast Asia*. Leiden: Brill.

⁴⁸ Saeed, A. (2014). *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*. Routledge.

KESIMPULAN

Pemikiran Imām Jalāluddīn al-Suyūṭī dalam Ar-Risālah as-Sultāniyyah menegaskan bahwa relasi antara ulama dan umara harus dibangun di atas dasar etika moral, bukan kepentingan politik. Ulama memiliki tanggung jawab menjaga kemurnian ilmu dan menjadi penuntun moral bagi penguasa dengan tetap menjaga jarak dari godaan kekuasaan. Prinsip istiqlāl al-‘ālim (independensi ulama) dan nasīḥah lil-ḥukkām (nasihat kepada penguasa) menjadi fondasi utama dalam menata hubungan yang seimbang antara agama dan negara, sehingga kekuasaan tidak kehilangan arah moral dan nilai keadilan.

Dalam konteks modern, nilai-nilai tersebut tetap relevan meskipun memerlukan adaptasi kelembagaan dan sosial. Ulama masa kini dituntut untuk berperan aktif dalam ruang publik tanpa kehilangan integritas moralnya. Dengan demikian, ajaran Suyūṭī dapat dipahami sebagai panduan universal bagi terciptanya hubungan harmonis antara ulama dan umara, hubungan yang menempatkan agama sebagai penjaga nurani bangsa dan kekuasaan sebagai sarana untuk menegakkan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2006). Islam dan ilmu pengetahuan: Integrasi epistemologi Islam dan humaniora. Yogyakarta: SUKA Press.
- Ahmad, S. (2023). Etika hubungan ulama dan penguasa dalam perspektif Islam klasik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Islam*, 8(2), 45–59.
- al-Ghazālī, A. H. (n.d.). *Iḥyā’ ‘Ulūm ad-Dīn* (Vol. 2). Beirut: Dār al-Ma‘rifah.
- al-Sakhāwī, M. (1985). *Al-Ḍaw’ al-Lāmi’ li Ahl al-Qarn at-Tāsi’*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Sāwī, A. (2020). *Al-Manhaj al-‘Ilmī ‘inda al-Suyūṭī*. Kairo: Jāmi‘ah al-Azhar.
- Al-Suyūṭī, J. (1994). *Ar-Risālah as-Sultāniyyah*. Kairo: Dār al-Manār.
- Ayalon, D. (1994). *Mamluk military society: A study of medieval Egypt*. London: Variorum.
- Ensiklopedia Islam. (n.d.). As-Suyuti. <https://ensiklopediaislam.id/as-suyuti>
- Hallaq, W. B. (2010). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Hathaway, J. (2003). A tale of two fifteenth-century Egyptian historians. In *The Mamluks in Egyptian politics and society* (pp. 75–96). Leiden: Brill.
- Hefner, R. W. (2021). Islamic Institutions and Democracy in Indonesia. *The Review of Faith & International Affairs*, 19(4), 12–24.
- Ibn al-Jawzī, A. F. (1983). *Ṣayd al-Khāṭir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ichwan, M. N. (2011). Official Ulama and the State: The Ulama Council of Indonesia in the Politics of Religious Authority. *Journal of Indonesian Islam*, 5(1), 37–66.
- Kamali, M. H. (2018). *The Middle Path of Moderation in Islam*. Oxford University Press.
- Kisah Imam Jalaluddin As-Suyuthi. (2020, Juli 19). *Ar-Rasyiid*. <https://www.arrasyiid.my.id/2020/07/kisah-imam-jalaluddin-as-suyuthi.html>
- Levanoni, A. (1995). *A turning point in Mamluk history: The third reign of al-Malik al-Nasir Muhammad ibn Qalawun*. Leiden: Brill.

- Mastori, M., Arifin, Z., & Iman, S. B. (2021). Historical review of ulama and umara' relations and its implications for Islamic da'wah. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 15(1), 103-126.
- Masud, M. K. (2012). *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*. Harvard University Press.
- Noorhaidi, H. (2018). *Islam on the Move: The Tablighi Jama'at in Southeast Asia*. Leiden: Brill.
- Nurhayati, S. (2020). Etika sosial ulama dan umara dalam pemikiran politik klasik Islam. *Jurnal Tasamuh*, 18(2), 233-250.
- Rubaidi, R. (2025). Relasi kuasa ulama sufi dan negara dalam kultur-budaya politik Indonesia. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*.
- Sachedina, A. A. (2001). *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*. Oxford University Press.
- Saeed, A. (2014). *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*. Routledge.
- Yamani, A. (2018). *Al-nashīhah fī al-siyāsah al-shar'īyyah: Dirāsah tahlīliyyah*. Riyadh: Dār al-Ṣafwah.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.